

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dideklarasikan oleh K.H. Abdurrahman Wahid, K.H. Ilyas Ruhiyat, K.H. Munasir Ali, K.H. Mukhlis Muzati, dan K.H. Mustofa Bisri, pada tanggal 23 Juli 1998 di Ciganjur Jakarta Selatan, adalah partai politik yang memiliki basis dukungan utama dari masyarakat Nahdliyin. Partai politik yang dibidani oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini merupakan partai Islam dengan semangat Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Basyariah, dan Ukhuwah Wathaniyah. (Sahar L. Hasan, 1998 : 24)

Berpijak dari spiritual agama dan pemahaman ke-Indonesia-an yang plural, PKB merupakan partai politik yang mempunyai semangat kebangsaan yang demokratis dan terbuka dengan mengemban fungsi sebagai wadah berhimpun bagi setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul keturunan, suku, golongan, agama, dan profesi, sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan pendidikan kesadaran dan partisipasi politik.

Dengan komitmen nasionalismenya, PKB menggagas orientasi kebangsaan yang bermuara pada tujuan mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, secara lahir bathin, material dan

spiritual, dan mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan berakhlakulkarimah. (Sahar L. Hasan, 1998 : 24)

Partai Kebangkitan Bangsa bukan sekedar lahirnya wadah baru penyaluran aspirasi politik warga NU, tapi juga menjadi parameter bagi soliditas politik organisasi sosial keagamaan yang berbasis massa di pesantren dan pedesaan. Perolehan suara dalam pemilu dan posisi PKB dalam percaturan politik nasional dapat menjadi cermin kesadaran kolektif warga Nahdliyin dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kehadiran partai ini tidak saja memperkaya panggung politik Indonesia tetapi juga menjadi tolak ukur sejauh mana ikatan-ikatan kultural yang menjadi andalan perekat kesadaran kolektif itu mengejawantah kedalam gerakan politik di era yang sudah berubah. (Musa Kazhim dan Alfian Hamzah, 1999 : 273)

Partai Kebangkitan Bangsa sangat beruntung dengan basis massa, karena tidak ada yang meragukan akan besarnya massa NU di Indonesia. Dalam hal ini meski Partai Kebangkitan Bangsa dibentuk secara eksklusif oleh kalangan NU, akan tetapi memiliki prospek yang menjanjikan. Selain karena basis massa yang besar, juga karena keinklusiannya dalam mengakomodasi semua golongan.

Selain Partai Kebangkitan Bangsa, ada beberapa partai yang mensinyalir mempunyai basis warga NU terutama pesantren, yaitu Partai Nahdlatul Ummah (PNU) yang dipimpin oleh K.H. Syukron Makmun, Partai Kebangkitan Umat (PKU) yang dipimpin oleh K.H. Yusuf Hasyim, dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (Partai SUNI) yang dipimpin oleh Abu Hasan. (Asmawi, 1999 : 72)

Didalam hasil pemilu 1999 Partai Kebangkitan Bangsa ternyata mampu berada pada posisi ketiga dibawah dua partai lain yang sudah lama berkiprah pada masa orde baru yang sudah sarat pengalaman dalam mengikuti pemilu. Dengan perolehan suara yang diraih PKB sebanyak 13.336.982, sementara diperingkat pertama adalah PDI-P dengan perolehan suara sebanyak 35.689.073, dan diperingkat kedua yaitu Partai Golkar dengan perolehan suara sebanyak 23.741.749. Dan itu juga berarti bahwa PKB dapat menarik massa NU sebanyak banyaknya dibandingkan dengan partai-partai lainnya yang sama-sama mensinyalir memiliki basis massa NU. (Media Indonesia, 18 Juli 1999 : 1)

Hal diatas menunjukkan bahwa prestasi yang diraih PKB pada Pemilu 1999 sangat gemilang. Kesuksesan PKB ditingkat nasional ini tentunya juga berkat keberhasilan PKB didaerah-daerah, diantaranya di Kota Bandung.

Di Kota Bandung, PKB menduduki peringkat keenam dalam perolehan suara. Suara yang diperoleh PKB untuk DPR 52.539, DPRD I 53.531, dan DPRD II 54.069, dibawah PDI-P dengan perolehan suara 449.998 untuk DPR, 449.218 untuk DPRD I, 446.124 untuk DPRD II, sedangkan PAN memperoleh suara 242.753 untuk DPR, 235.697 untuk DPRD I, 232.945 untuk DPRD II, Partai Golkar memperoleh suara 199.624 untuk DPR, 198.328 untuk DPRD I, 197.217 untuk DPRD II, PPP memperoleh suara 106.823 untuk DPR, 107.574 untuk DPRD I, 107.135 untuk DPRD II, PBB memperoleh suara 74.311 untuk DPR, 75.876 untuk DPRD I, 74.613 untuk DPRD II. (KPU Kota Bandung, 2000 : 310-312)



Namun disamping keberhasilan yang diperoleh PKB diatas pada tahun 2001 telah terjadi suatu peristiwa yang bisa menghambat keberhasilan PKB pada pemilu 2004 dengan terpecahnya PKB menjadi 2 kubu yaitu kubu PKB Batu tulis yang dipimpin oleh Matori Abdul Jalil dan kubu PKB Kuningan yang dipimpin oleh Alwi Shihab. Perpecahan diatas terjadi karena suatu sebab yang diawali karena digelarnya Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001 dikarenakan DPR sudah tidak mempercayai lagi akan kepemimpinan Gusdur sebagai presiden disebabkan adanya kasus Brunei Gate, dan adanya Dekrit Presiden yang menyebabkan situasi politik di tanah air pada saat itu menjadi tidak menentu, adapun yang memimpin SI MPR tersebut salah satu diantaranya adalah Matori Abdul Jalil yang pada saat itu beliau menjabat sebagai wakil ketua 1 MPR dan juga menjabat sebagai ketua umum PKB, yang pada akhirnya sidang tersebut menetapkan turunnya Gusdur dari kursi kepresidenan. Sedangkan pada saat itu PKB sendiri menolak SI MPR tersebut karena dianggap inkonstitusional.

Dengan adanya kejadian diatas maka PKB melalui Gusdur sebagai ketua Dewan Syura mengganti Matori dari kursi ketua umum PKB dan mengangkat Alwi Shihab sebagai penggantinya, adapun Matori sendiri menolak keputusan tersebut dengan alasan bahwa ketua Majelis Syura tidak dapat menurunkan ketua umum kecuali melalui jalur muktamar.

Dan pada akhirnya PKB pecah menjadi dua kubu yaitu kubu Matori yang berubah namanya menjadi PeKaDe dan kubu Alwi Shihab dengan membawa bendera PKB.

Dan ternyata kondisi diatas mempengaruhi peta politik dan kesolidan para pengurus paratai ditingkat bawah terutama di Kota Bandung, dengan adanya pemisahan dari beberapa kelompok partai yang lebih memihak kepada kubu Matori Abdul Jalil.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka hal tersebut merupakan suatu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti lebih mendalam mengenai kondisi objektif DPC PKB Kota Bandung, faktor SWOT, kebijakan dan strategi serta program peraihan massa bagi kemenangan pemilu 2004.

Adapun topik yang diangkat adalah sebagaimana yang tertuang dalam judul yaitu “Strategi DPC PKB Kota Bandung Dalam Meraih Massa Menjelang Pemilu 2004”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dikemukakan bahwa fokus masalah dalam penelitian ini akan berkisar pada hal-hal berikut :

1. Bagaimana kondisi objektif DPC PKB Kota Bandung.
2. Apa yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) bagi DPC PKB Kota Bandung.
3. Bagaimana kebijakan dan strategi DPC PKB Kota Bandung menghadapi pemilu 2004.
4. Bagaimana program peraihan massa DPC PKB Kota Bandung.

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka yang menjadi tujuan dalam penelian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif DPC PKB Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) bagi DPC PKB Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan strategi DPC PKB Kota Bandung menghadapi pemilu 2004.
4. Untuk mengetahui bagaimana program peraihan massa DPC PKB Kota Bandung.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Islam sebagai agama Allah merupakan suatu sistem kehidupan yang meliputi semua aspek kehidupan. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah politik.

Dalam perspektif Islam, politik dapat diposisikan sebagai instrumen dakwah. Oleh karena itu kekuasaan yang diberikan oleh rakyat pada hakekatnya adalah suatu amanah, maka kekuasaan atau suatu jabatan apapun harus disertai dengan pertanggungjawaban. Disinilah dituntut bahwa berpolitik perlu memperhatikan akhlak, etika, aspirasi rakyat, dan tuntunan nilai-nilai Islam. (Sahar L. Hasan, 1998 : 13)

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari



sistem politik itu menyangkut seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (public goals), dan bukan tujuan pribadi seorang (privat goals). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk kegiatan partai politik dan kegiatan perorangan. (Miriam Budiardjo, 1998 : 8)

Di dunia timur, dipergunakan istilah siyasah sebagai pengganti istilah politik, yang tidak dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap orang banyak, atau sebagai administrasi negara dan masyarakat. Siyasah menurut pengertian bahasa berarti “mengajar kuda liar”, kata ini telah mengandung pengertian yang mencakup pendidikan, pembaruan dan penyempurnaan. Bentuk pemerintahan seperti ini, dipandang dari sudut istilah politik merupakan tugas yang berfungsi merubah masyarakat dari kondisi spiritual, moral, intelektual dan sosial yang didalamnya tersedia dan harus diperoleh kesejahteraan bagi mereka. (Ali Syari’ati, 1995 : 56)

Sedangkan menurut pendapat lain mengemukakan bahwa siyasah berasal dari kata siyasat artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Dalam pengertian al-siyasah, mengandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain : (1) “tujuan” yang hendak dicapai melalui proses pengendalian. (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu al-siyasah pun diartikan : *“Memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan”*.

Adapun Ibnu ‘Aqil memberikan pengertian mengenai istilah siyasah dengan : segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih

jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya. (Atjep Djazuli, 2000 : 24-25)

Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. (J. Suyuthi Pulungan, 1993 : 23)

Adapun dasar-dasar didalam menjalankan ketatanegaraan demi terciptanya kemaslahatan hidup bagi seluruh masyarakat dan bangsa harus memperhatikan kepada prinsip-prinsip siyasah Syar'iyah, yaitu :

1. Prinsip kebebasan (al-hurriyyah)

Prinsip kebebasan ini berbicara seacara umum, baik individual maupun komunal dan meliputi kebebasan beragama, berpolitik serta berserikat. Adapun pelaksanaan kebebasan berpolitik antara lain dapat dilihat didalam perjanjian Hudaibiyah atau dalam konstitusi Madinah.

2. Prinsip Musyawarah (al-syura)

Prinsip ini tercantum secara tekstual didalam Al-Quran yaitu didalam surat Ali Imran ayat 159 dan surat Al-Syura' ayat 38 dan Sunnah (fi'liyyah) pun menunjukkan adanya praktek musyawarah yaitu apabila Rasul menghadapi suatu masalah beliau melemparkannya kepada para sahabat yang kemudian dimusyawarahkan dan diambil pendapat yang dinilai paling benar dan baik.



### 3. Prinsip persamaan (al-musawa)

Landasan prinsip ini terdapat didalam surat Al-Hujurat ayat 13, dan kelanjutan dari prinsip ini Islam memerintahkan kepada umat manusia supaya memiliki sifat solidaritas sosial dan saling menolong antar kelas, antar lapisan masyarakat dan antar golongan didalam hal kebajikan.

### 4. Prinsip keadilan atau keseimbangan (al-'adl)

Prinsip keadilan berarti melaksanakan hukum Islam didasarkan atas kejujuran dan kasih sayang. Melalui keadilan itulah masyarakat dibina, yakni dijadikan masyarakat yang seimbang dalam berbagai lapangan kehidupan. Prinsip keadilan inilah yang kemudian menjadi asas persamaan dimuka hukum.

### 5. Prinsip kritik konstruktif (mu'aradlah)

Prinsip mu'aradlah ini berarti pengawasan masyarakat atas kebijaksanaan pemerintah sebagai kelanjutan dari prinsip kebebasan. Prinsip mu'aradlah adalah kelanjutan dari pesan Rasul yang berbunyi al-Diin al-Nashiihah yang berarti bahwa agama didalam konteks kenegaraan adalah nasihat atau kritik konstruktif.

### 6. Prinsip introspeksi (muhasabat al-nafs)

Muhasabat al-nafs adalah auto critique, yaitu membuka berbagai kelemahan dan kekurangan diri sendiri lalu mengetahui sebab-sebab dan cara-cara memperbaikinya. Dalam teori hukum Islam prinsip ini harus dilaksanakan dalam negara yang dipimpin oleh siapapun juga. Banyak ayat Al-Quran yang mengharuskan umat manusia untuk melaksanakan prinsip diatas antara lain al-Ra'd ayat 12, Ali Imran ayat 145, dan yang lainnya. (Juhaya S. Praja, 1995 : 85-87)

Didalam kurikulum Fakultas syari'ah digunakan istilah fiqh dusturi, yang dimaksud dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti didalam perundang-undangannya, peraturan-peraturannya dan adat-adatnya.

Abul A'la al-Maududi menta'rifkan dusturi dengan suatu dokumen yang mengandung prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.

Dari dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata dustur sama dengan kata Constitution dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, adapun kata dasar dalam bahasa Indonesia tidak mustahil berasal dari kata dustur tersebut diatas. (Atjep Djazuli, 2000 : 51)

Salah satu wadah untuk menyalurkan aspirasi politik adalah melalui partai politik. Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan mereka.

Untuk memperoleh dukungan rakyat, suatu partai politik harus menyampaikan mengenai seluk-beluk mengenai partainya secara terbuka kepada rakyat, proses ini disebut sosialisasi politik.

Sosialisasi politik adalah suatu proses dimana seorang individu dapat mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya

mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. (Michael Rush dan Phillip Althoff, 1997 : 22)

Dalam proses sosialisasi politik diperlukan komunikasi antara partai dengan rakyat, selanjutnya disebut komunikasi politik. Komunikasi politik pada komunikasi politik adalah seluruh individu yang berada pada infrastruktur politik baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar dan asosiasi-asosiasi serta lembaga-lembaga yang erat kaitannya dengan kehidupan politik. (Somarno, 1989 : 120)

Tahap inilah yang merupakan awal keterlibatan rakyat dalam partisipasi politik. Individu-individu komunikasi politik dapat menggerakkan individu lain dan massa. Massa pada dasarnya terbentuk karena suatu ikatan atau didasari pikiran tertentu. (Sumarno, 1989 : 120-121)

Lalu dalam perkembangan selanjutnya terjadilah partisipasi, partisipasi ini dapat spontan sifatnya. Akan tetapi lebih besar kemungkinannya partisipasi tersebut telah terorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok kepentingan sebagai bagian dari kegiatan politik mereka. Selanjutnya Michael Rush dan Phillip Althoff mengemukakan bahwa kegiatan pemberian suara dalam pemilu dapat dikatakan sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. (Michael Rush dan Phillip Althoff, 1997 : 129)

Pemberian suara sebagai salah satu kegiatan partisipasi politik paling kecil biasanya merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan pemilihan umum. Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sarana untuk memilih diantara dua



alternatif atau lebih dengan jalan pemberian suara. (Michael Rush dan Phillip Althoff, 1997 : 194)

Suatu hal, gagasan, ideologi, dan konsep-konsep suatu partai politik biasanya tertuang dalam platform partai tersebut. Platform Partai Kebangkitan Bangsa tertuang dalam mabda Siyasi (titik tolak politik) dengan pendekatan fiqh siyasi, sebagaimana dikemukakan oleh Muhaimin Iskandar.

Pertama, prinsip dasar mabda siyasi Partai Kebangkitan Bangsa adalah untuk mewujudkan bangsa yang dicita-citakan, yaitu masyarakat yang terjamin kebebasan hak asasi kemanusiaannya.

Kedua, untuk merealisasikan prinsip dasar tersebut, ditempuh dengan pendekatan amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyerukan kebajikan dan mencegah kemunkaran.

Ketiga, sebagai bagian dari bangsa yang pluralistik, Partai Kebangkitan Bangsa memandang bahwa tatanan kehidupan bangsa harus berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila.

Keempat, Partai Kebangkitan Bangsa berkehendak untuk menyerap, menampung, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk menegakkan hak-hak rakyat dan menjamin pelaksanaan ketatanegaraan yang jujur, adil, dan demokratis.

Kelima, penjabaran dari misi yang diemban Partai Kebangkitan Bangsa untuk terwujudnya masyarakat yang dicita-citakan harus melalui kebijakan publik.

Keenam, kekuasaan dalam pandangan Partai Kebangkitan Bangsa adalah milik Tuhan Yang Maha Esa.

Ketujuh, kekuasaan pada hakekatnya merupakan amanat dan harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan dan dikontrol pengelolaannya oleh rakyat.

Kedelapan, dalam perjuangan politiknya, Partai Kebangkitan Bangsa memegang teguh sifat terbuka (inclusive).

Kesembilan, musyawarah dalam menyelesaikan masalah sosial yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya, dan persamaan kedudukan bagi setiap warga negara adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan.

(Sahar L. Hasan, 1998 : 26-28)

#### **E. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

##### **1. Lokasi penelitian**

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai strategi Partai Kebangkitan Bangsa dalam menarik massa pada Pemilu 2004 di Kota Bandung, maka penulis mengambil tempat penelitian di kantor sekretariat DPC PKB Kota Bandung Jl. Sekelimus XII No. 3 Kelurahan Batununggal Kecamatan Bandung Kidul.

##### **2. Metode penelitian**

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh.

### 3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data yaitu :

- a) Sumber data primer, adalah sumber yang harus ada dan menjadi sumber pokok dari data-data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh langsung dari para pengurus DPC PKB Kota Bandung
- b) Sumber data sekunder, yaitu dokumentasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti : catatan, buku-buku kepustakaan, surat kabar dan sebagainya.

### 4. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif, berupa penjelasan kondisi objektif dari DPC PKB Kota Bandung, faktor SWOT, kebijakan dan strategi serta program peraihannya massa DPC PKB Kota Bandung menghadapi pemilu 2004.

### 5. Teknik pengumpulan data

#### a) Interview

Yaitu cara pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.

#### b) Studi kepustakaan dan dokumentasi

teknik ini digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data atau teori dari buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yang kemudian dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.



## 6. Pengolahan dan analisa data

Data diolah dan dianalisis dengan menggunakan pola analisis isi dan langkah-langkah pengolahan dan analisis data dengan kategorisasi, klasifikasi, perbandingan dan dihubungkan secara substitusi.

Dari penafsiran data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai strategi DPC PKB Kota Bandung dalam meraih massa menjelang pemilu 2004.

